

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Abdurrahman Wahid dan Pemikiran Politik tentang Hubungan Islam dan Negara

1. Biografi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid nama aslinya adalah Abdurrahman Addhakhil, namun ia lebih populer dengan nama Gus Dur. Ia dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di tempat yang kental dengan suasana kesantrian dan religi, di Denanyar Jombang Jawa Timur sebagai buah perkawinan KH. Wahid Hasyim dengan Hajjah Solihah bin KH. Bisri Syamsuri¹

Secara genetik beliau adalah keturunan berdarah biru dari tokoh ulama terkemuka Nahdlatul Ulama' (NU) dan tokoh besar bangsa Indonesia. Ayahnya KH. Wahid Hasyim sendiri adalah putra Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pendiri NU dan pejuang kemerdekaan. Ayahnya termasuk tokoh NU dan pernah menjabat ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU). Pada zaman kemerdekaan ayahnya bersama Ir. Soekarno dan kawan-kawannya termasuk salah seorang perumus "Piagam Jakarta". KH. Wahid Hasyim pernah menjabat Menteri Agama pada masa RIS. Ibunya Hj. Sholihah juga putri tokoh besar NU, yakni KH. Bisri Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Rois 'Aam Syuriah PBNU setelah KH. Wahab Hasbullah.²

Adapun jenjang pendidikan yang dilewati oleh Gus Dur yakni Pada tahun 1953 sampai 1957 belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Gus Dur tinggal di rumah Kyai Haji Junaid, seorang Kyai Muhammadiyah dan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Beberapa tahun kemudian, ia mondok di Pesantren Tegalrejo, sebuah pesantren NU terkemuka di Magelang, Jawa Tengah dibawah bimbingan khusus KH. Chudhori dan Kyai ini pulalah yang memperkenalkan kepada Gus Dur amalan-amalan ritual dan mistik secara mendalam dalam Islam Jawa yang sampai hari ini

¹ Acmad Fachruddin, *Gus Dur Dari Pesantren Ke Istana Negara*, (Jakarta: Yayasan Gerakan Amaliyah Siswa (GAS), 1999), 17

² Humaidi Absussami dan Ridwan, *Biografi Lima Rais A'am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) 59-104.

tetap diamalkan. Kyai ini adalah antara lain sosok yang dikagumi Gus Dur karena sosok yang humanis. Di bawah bimbingan Kyai ini, Gus Dur kerap kali melakukan ziarah kubur ke beberapa wali di Jawa pada hari-hari tertentu, berdoa dan membaca Al-Qur'an di Candimulyo. Ini semua merupakan pengalaman religius yang memperdalam dimensi spritualitas Gus Dur. Kemudian pada tahun 1957, ia sempat nyantri di Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah KH. Ali Maksum. Tahun 1959 sampai 1963, Gus Dur belajar di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, asuhan kakek dari ibunya, KH. Bisri Syamsuri. Ketika itu, ia pun diminta mengajar santri dan santriwati yang lebih muda termasuk Sinta Nuriyah yang kemudian diperistrikannya.³

Pada tahun 1964 bertepatan 23 tahun umurnya, Gus Dur meninggalkan tanah air menuju Kairo, Mesir, untuk belajar ilmu-ilmu agama di Ma'had al-Dirasat al-Islamiyyah yang berada di lingkungan al-Azhar Islamic University. Keberadaannya di lembaga pendidikan tertua di Timur Tengah ini menjadikan Gus Dur sangat kecewa dengan atmosfer intelektual di al-Azhar yang memadamkan potensi pribadi karena teknik pendidikannya yang masih bertumpu pada kekuatan menghafal, bahkan kekesalannya menjadi-jadi karena apa yang dipelajari di sana telah dihafal ketika ia berada di Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah dan Krapyak Yogyakarta. Merasa tak pas dengan situasi dan teknik pengajaran dan pembelajaran di al-Azhar University ini, sebagai gantinya, ia menghabiskan waktu di salah satu perpustakaan yang lengkap di Kairo, termasuk American University Library, Dar al-Kutub dan Perpustakaan Universitas Kairo. Meski kecewa, ia tetap menikmati kehidupan kosmopolitan Kairo, bahkan beruntung karena terbukanya peluang-peluang untuk bergabung dengan kelompok-kelompok diskusi dan kegiatan tukar pikiran yang umumnya diikuti para intelektual Mesir. Yang perlu dicatat bahwa selama di Kairo, Gus Dur begitu tertarik pada film-film Perancis dan sepak bola, bahkan terkadang menonton film sampai dua atau tiga kali sehari. Di Kairo, Gus Dur aktif di mana-mana, termasuk di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) untuk Timur Tengah sebagai Sekretaris Umum masa bakti 1964 hingga 1970. Akan tetapi

³ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), 19-20.

hal ini tidak menjadikannya betah yang pada akhirnya terbang ke Baghdad tepatnya di Universitas Bagdad. Di Perguruan Tinggi ini Gus Dur melewatinya dengan penuh rasa bahagia karena mempelajari sastra Arab, filsafat dan teori sosial Eropa. Selain itu, terpenuhi pula hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, sistem yang diterapkan di Universitas Baghdad ini, yang dalam beberapa segi dapat dikatakan lebih berorientasi Eropa daripada sistem yang diterapkan di Mesir.⁴

Pada tahun 1971, Gus Dur mampir ke Eropa dengan harapan memperoleh penempatan di sebuah Universitas, tapi sayang sekali ternyata kualifikasi-kualifikasi mahasiswa dari Timur Tengah tidak diakui di universitas-universitas Eropa. Inilah yang memotivasi Gus Dur pergi ke Mc Gill University, Kanada, untuk mempelajari kajian-kajian keislaman secara mendalam. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah terilhami berita-berita menarik sekitar perkembangan dunia pesantren, termasuk berita hangat tentang politik tanah air.⁵

Perjalanan Gus Dur di luar negeri berakhir pada Juni 1971. Pertama kalinya datang di Indonesia, ia bergabung di Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ari (UNHAS), Jombang sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan pada tahun 1969 oleh tokoh-tokoh NU. Di Perguruan Tinggi ini, Gus Dur mengajar Teologi dan beberapa mata kuliah agama lainnya. Pada tahun 1974, dia menjadi Sekretaris Pesantren Tebuireng Jombang. Masih tahun yang sama, terlihat pula keaktifannya sebagai penulis kolom dan artikel berbagai harian dan majalah, di samping itu sibuk pula sebagai pemakalah pada berbagai seminar dan diskusi,⁶ baik seminar yang sifatnya regional, nasional maupun internasional.

Gus Dur juga aktif di LSM, di antaranya mendirikan LP3ES dan P3M. Melalui gerakan LSM ini, ia terus terlibat dan

⁴ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999), 327.

⁵Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahib, dan Abdurrahman Wahid*, terj Nanang Tahqiq (Jakarta: Paramadina, 1999), 327-328.

⁶ Al-Zastrow Ngatawi, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan ? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 28

terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran baik nasional maupun internasional. Hingga kemudian menjadi ketua umum PBNU. Ia menjabat ketua umum PBNU tiga periode, mulai tahun 1984 hingga 1999. Melalui NU, ia membela kepentingan-kepentingan Islam dan melawan ancaman modernisasi oleh Orde Baru.⁷

Perjuangannya dalam menegakkan demokrasi tidak hanya melalui NU, namun juga dilakukan bersama-sama tokoh yang tergabung dalam Forum Demokrasi (Fordem). Gus Dur memajukan visi demokrasi sekuler yang mengajukan pemisahan agama atas negara dan pemisahan negara atas agama, didikotomikan secara diametral. Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu pada negara.

Pada era reformasi ia mendeklarasikan partai baru yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui partai ia terjun kembali ke dunia politik dan akhirnya pada sidang umum MPR tahun 1999 ia dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Megawati Soekarnoputri. Namun jabatan ini hanya berlangsung selama 20 bulan, karena dilengserkan sidang istimewa MPR.

2. Karya-karya Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah tokoh politik, agamawan, negarawan, dan guru bangsa, banyak pemikirannya yang telah dicurahkan melalui karya-karyanya ilmiah memberikan kontribusi kepada bangsa ini, baik dalam bentuk tulisan artikel yang dimuat diberbagai media masa maupun sejumlah buku yang telah diterbitkannya. Kegemarannya dalam membaca dan menulis, membuat Gus Dur memiliki karya tulis yang lumayan banyak. penulis menjabarkan karya tulis beliau sebagai berikut:

- a. Muslim di Tengah Pergumulan (Jakarta: Leppenas, 1983)
- b. Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001)
- c. Gus Dur Menjawab Tantangan Zaman (Jakarta: Kompas, 1999)
- d. Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

⁷ John, L. Esposito dan John O. Voll, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, 259.

- e. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)
- f. Gus Dur Bertutur (Jakarta: harian proaksi dan Gus Dur fodation,2001)
- g. Bunga Rampai Pesantren, (Jakarta: Darma Bhakti, 1994)
- h. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, (Depok: Kajian Perempuan Desantara, 2001)
- i. Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta : LKIS, 1999)
- j. Politik demi Tuhan: nasionalisme religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)
- k. Islam dalam Cinta dan Fakta (1981)
- l. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (1999)
- m. Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian (2010)
- n. Gus Dur dan Sepakbola: Kumpulan Kolom Gus Dur Tentang Sepak Bola (2014)

3. Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid tentang Hubungan Islam dan Negara

Hubungan Islam dan Negara, merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting sebagai gejala sosial. Hubungan tersebut merupakan cermin agama Islam dalam masyarakat. Menurut Gus dur Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gus Dur adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: *pertama*, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. *Kedua*, ditegaskan keadilan. *Ketiga*, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah).⁸

Gus Dur menyadari bahwa pada dasarnya Islam memang tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak akan pernah lepas dari politik, Ia juga sepakat dengan aksioma bahwa Islam adalah agama pembebasan (*a liberating religion*). Konteks kesejarahan Islam menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan ditengah masyarakat komersial Arab pada saat itu. Al-Qur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli kepada hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-

⁸Indo Santalia, *Agama dan Negara, Pluralisme, Demokrasi, dan Pribumisasi*, Jurnal Al- Adyaan, Volume I, Nomor 2, Desember 2015, 139

kelas masyarakat yang lebih kuat. Fakta historis ini merupakan alasan mengapa Islam memusatkan perhatiannya pada signifikasi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Gus Dur memandang hubungan agama dan negara tidak ada kaitan formal, tetapi pemikirannya didasari bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan melainkan sebuah etika kemasyarakatan dan komunitas. Gus Dur dalam melihat hubungan agama dan negara memunculkan gagasan mengenai: *pertama*, Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia. Untuk melakukan sintesis antara agama dan negara tersebut, ia mengajak komunitas Islam untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sebuah ideologi alternatif. Sebaliknya Islam harus diposisikan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial, budaya, dan politik Indonesia sehingga menimbulkan sebuah peran yang sama bagi setiap kelompok agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, pribumisasi Islam, maksudnya adalah proses kesadaran dan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang memiliki pluralitas sosio-historis berbeda, karena pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan bukan upaya untuk menghindari polarisasi agama dan budaya. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena pribumisasi Islam masih terdapat sifat Islamnya.⁹

Dalam pandangannya, ia menolak ketika Islam dijadikan ideologi, karena ketika agama, negara, budaya diideologikan fungsinya akan terdistorsi dan malah tidak menimbulkan struktur yang lebih baik, justru akan memicu disintegrasi yang berbasis sekretariat dan konflik horizontal. Menurutnya, ada dua alasan mengapa ia menolak didirikannya negara Islam. *Pertama*, argumentasi normatif-teologis, yang menyebutkan bahwa daulah Islamiyah (*Islamic State*) tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Memang dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi *baldatun tayibatun wa rabbun ghafur*, sebuah ayat yang lebih pada konteks sosiologi, yaitu negara yang baik, penuh pengampunan Tuhan. Atas dasar inilah Islam tidak memberi konsep yang jelas, melainkan hanya memberi nilai etik bagi kehidupan bangsa dan negara. *Kedua*, argumentasi historis, yaitu berkaitan dengan

⁹ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), 70.

fakta bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah menunjukkan adanya mekanisme baku bagaimana suksesi dalam Islam. Hal ini bisa kita lihat dari keempat Khalifah pertama sepeninggalnya Rasulullah SAW, semuanya diangkat melalui mekanisme yang berbeda satu sama lain, padahal pengangkatan seorang kepala negara merupakan bagian utama untuk mengetahui sistem kenegaraan.¹⁰

Gus Dur juga mengatakan bahwa Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut.

Dalam hal ini Gus Dur menjelaskan aspek-aspek yang dikandung dalam Agama (Islam) sebagai berikut:

a. Agama dan Budaya

Agama dan budaya bagaikan koin yang tidak dapat dipisahkan. Agama mendapatkan wahyu normatif, itu cenderung menjadi permanen. Padahal kebudayaan adalah ciptaan manusia, karena itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung selalu berubah. Perbedaan ini tidak menutup kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.

Islam dalam hal kehidupan nasional adalah ide yang perlu diamati. Gus Dur mengatakan bahwa pribumi bukanlah upaya untuk menghindari munculnya resistensi dari kekuatan budaya lokal, tetapi lebih dari itu sehingga budaya itu tidak hilang. Esensi dari pribumi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, karena polarisasi seperti itu tidak dapat dihindarkan.¹¹

¹⁰ Khamami Zada, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h.122.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok : Desantara,) 118. 196

Gagasan Gus Dur tampaknya menunjukkan Islam sebagai agama yang menghormati konteks lokal dan mempertahankan realitas pluralisme budaya yang ada. Ia dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi budaya, karena semua simbol atau identitas harus menggunakan ungkapan bahasa Arab. Keseragaman yang sama tidak hanya membebaskan kreativitas dari budaya Umat, tetapi juga menciptakan Islam yang teralienasi dari arus utama budaya nasional. Proses dekomposisi Arabisasi adalah mundur dari akar budaya kita sendiri.

b. Agama dan Etika Sosial

Gagasan etika sosial dalam pemikiran Gus Dur berangkat dari pemaknaan atas konsep akhlak dalam Islam yang ia pahami tidak sebagai akhlak individu. Tetapi sebagai akhlak yang bersifat sosial, karena bagi Abdurrahman Wahid, Islam tidak hanya menyediakan aturan normatif tentang sopan-santun individu, akan tetapi menyediakan kerangka etis kehidupan masyarakat yang baik. Komitmen etika sosial adalah dalam rangka kontekstualisasi ajaran Islam di tengah dinamika dan problematika kemanusiaan. Terutama dalam konteks kemanusiaan dan keIndonesiaan. Dengan cara ini Islam akan benar-benar menjadi jawaban setiap problematika kebangsaan tanpa kehilangan spirit etisnya sebagai agama yang agung.

c. Agama dan Demokrasi

Saat ini ada hubungan erat antara agama dan demokrasi, di mana gerakan keagamaan aktif mendukung upaya untuk menegakkan agama. Di Indonesia, ini juga terjadi. Pemimpin gerakan agama menggantikan perang untuk kemerdekaan nasional dari kolonialisme dan kemudian berjuang untuk demokrasi, ketika sistem pemerintahan menjadi semakin otoriter. Bagaimana kegiatan yang dikembangkan di antara agama menjadi pelopor, untuk yang lebih kecil, untuk mengembangkan masyarakat demokratis. Karena isu kebebasan berpendapat dan berserikat dengan masalah polusi lingkungan, gerakan

keagamaan secara langsung terlibat dalam upaya menegakkan demokrasi.¹²

Posisi antara Islam dan negara, Gus Dur melihat ada tiga pandangan utama yang berkembang di dunia Islam abad modern ini. *Pertama*, adanya pandangan untuk mendirikan sebuah negara yang khusus Islam, seperti Iran dan Arab Saudi, *Kedua*, pandangan bahwa Islam adalah agama resmi negara, namun negaranya sendiri negara Islam, seperti Malaysia. *Ketiga*, antara negara dan agama tidak dikaitkan secara konstitusional, namun pelaksanaan syariah dibenarkan oleh negara, seperti Indonesia. Adanya ketiga pandangan tersebut menurut Gus Dur adalah akibat logis dari pertumbuhan sejarah, dan satu sama lain tidak tepat untuk saling menyalahkan. Jika ingin merumuskan bentuk hubungan antara agama dan negara, hal itu harus didudukkan dalam perspektif kesejarahan yang tepat, bagaimana mungkin didirikan negara Islam kalau tidak ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengambil keputusan tertinggi atau ahl al hall wal 'aqd. Dari kenyataan seperti inilah, adanya keharusan kepada umat muslim untuk menerima kenyataan bahwa di mayoritas kawasan dunia Islam, hanya bentuk hubungan ketiga yang dapat dilestarikan, yaitu negara menjamin hak kaum muslimin untuk melaksanakan syariah agama mereka, walaupun negara tidak mencantumkan Islam sebagai agama resmi.

Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Tampak bahwa Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga yang lainnya.¹³

Hal ini juga sesuai dengan perjuangan pluralisme Gus Dur. Artinya tidak bersikap diskriminatif terhadap agama selain Islam. Dalam negeri yang plural seperti

¹² Arif Pratama Susila, *Studi Analisis Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Agama*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Volume 2, Nomor 1, 2017, 116

¹³ YB. Sudarmanto, dkk, *Mathori Abdul Jalil, Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), h.14-15.

Indonesia, harus diberi kesempatan menjalankan dan mengamalkan syariat agamanya sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.

Pernyataan di atas bukan berarti bahwa bangsa Indonesia sebagian besar berpaham sekuler dalam arti hendak memisahkan urusan agama dari negara tetapi tidak lebih pada keadaan kemajemukan latar belakang agama, budaya, suku, dan kelompok. Bahkan jika Indonesia menjadi negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar negara, akan terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia karena tidak seluruh rakyat Indonesia umat Islam. Berdasarkan pernyataan diatas, NU adalah organisasi Islam pertama yang menrtima kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara.¹⁴

Dari situ Gus Dur dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa negara yang berideologi Pancasila termasuk negara damai yang harus dipertahankan, karena syariah dalam bentuk hukum agama, fikih, atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan dijalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintahan.

Dengan demikian, agama berperan menjadi sumber pandangan hidup bangsa dan negara atau dengan kata lain menjadi sumber bagi pancasila, disamping sumber-sumber lainnya. Ini adalah inti berhubungan antara Islam dengan pancasila. ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam hal ini pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang ada dalam agama Islam, namun, pada saat yang sama, ideologi menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, Islam berperan memotivasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup bangsa.¹⁵

¹⁴Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 233-261.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Grasindo , 1999), 92.

Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan negara. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang sedang berkembang. Upaya Gus Dur ini tidak lepas dari peran bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan. Gus Dur menambahkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam. Kejelasan lebih lanjut soal pemilahan antara agama dan negara ini menurut Gus Dur perlu dirumuskan lebih jauh, karena ketakutan akan hilangnya aspek-aspek keagamaan dari kehidupan pemerintahan kita itulah yang justru menimbulkan kebutuhan semu yang dirasakan sebagai sesuatu yang serius (oleh yang merasakannya) untuk melakukan formalisasi fungsi keagamaan dari pemerintah di bidang agama.¹⁶

Pandangan Gus Dur berdasarkan konteks keIndonesiaan, Islam tidak boleh menjadi agama negara. Pemikiran keislamannya dalam kerangka Islam kosmopolitan yang terkait dengan hubungan agama dengan kebangsaan merupakan kelanjutan dari corak pemahaman dan pembaruan keagamaan. Gus Dur menilai bahwa Islam harus dijadikan faktor komplementer dengan komponen-komponen bangsa yang lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.

Apabila asas kenegaraan menggunakan Islam secara legal dan formal, dikhawatirkan akan menciptakan permasalahan psikologis bagi umat nonmuslim yang juga merupakan bagian dari Indonesia dalam partisipasi membangun bangsa. Apabila hal itu terjadi, maka akan menyebabkan ikatan kebangsaan yang dibentuk para pendiri bangsa Indonesia menjadi rapuh. Gus Dur lebih menginginkan adanya negara tempat umat Islam dapat menjalankan syariah dan menegakkan tauhid tanpa harus menjadikan syariah sebagai sumber hukum. Ia

¹⁶ K Abdurrahman Wahid, "Kata pengantar" , dalam Einar M. Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), h.15.

menambahkan bahwa kunci syariah terletak pada sejauh mana umat Islam mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada proses melegalkan Islam sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan realitas historis ke-Indonesiaan yang tidak dapat dibantah. Dasar itulah yang dijadikan Gus Dur sebagai penegas pentingnya mengimplementasikan Islam sebagai etika sosial yang memposisikan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan masyarakat plural negara Indonesia.¹⁷

Dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara di Indonesia, Gus Dur sering menghubungkan antara agama (Islam) dengan Pancasila. Pada hampir semua tulisannya, Gus Dur menegaskan pentingnya pemisahan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama.

Agama dan pancasila memiliki fungsi masing-masing, sehingga tidak dapat diidentikkan secara menyeluruh. Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama merupakan landasan keimanan masyarakat dan menjadi motivasi, yang memberikan kekuatan spiritual pada setiap kegiatannya. Antara agama dan pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu tidak dapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan inilah yang menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bukan hanya sekedar ideologi negara saja.¹⁸

Menurut Gus Dur, ada tiga hal pokok demokrasi yaitu, kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Kebebasan adalah kebebasan individu sebagai warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Keadilan merupakan landasan

¹⁷ Mahar T P, Hermanu J, dan Saiful Bahri, *Abdurrahman Wahid: Study Pemikiran Tentang Relasi Agama dan Negara*. 35.

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Grasindo, 1999), 99-100.

demokrasi, dalam arti terbuka peluang bagi semua komponen masyarakat untuk mengatur hidupnya sesuai kehendak masing-masing. Oleh karena setiap orang punya hak dan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya sehingga harus diberi jalan yang mudah dan tidak dipersulit, seperti beberapa kasus yang terjadi pada saat Orde Baru. Pokok demokrasi yang ketiga adalah Syura atau musyawarah, artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan itu lewat jalur permusyawaratan.¹⁹

Menurut Gus Dur dalam masyarakat demokratis; 1) semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum, 2), yang berperan adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan kekuasaan, 3), kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, dan 4), adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁰ Disebutkan pula sebuah negara yang demokratis adalah yang mampu menjamin hak-hak dasar manusia, yang meliputi: 1). jaminan keselamatan fisik; 2). jaminan keselamatan keyakinan agama; 3). jaminan kehidupan keutuhan rumah tangga; 4). jaminan keselamatan hak milik; dan 5). jaminan keselamatan akal.²¹

Adapun nilai Nilai demokratisasi yang ditawarkan Gus Dur perlu dilakukan secara kontinyu, sebab tanpa itu mustahil demokrasi akan berjalan. Cara-cara pensosialisasiannya menurut Gus Dur adalah sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan normatif yaitu upaya untuk menerapkan kepada rakyat tentang pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi untuk kepentingan mereka. *Kedua*, pendekatan empirik, pendekatan yang sifatnya membangun kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi dari praktek pengalaman.²²

¹⁹ M. Masyhur Amin dan Mo Najib, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), 90.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), h.93.

²¹ M. Masyhur Amin dan Mo Najib, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), 97-98.

²² M. Masyhur Amin dan Mo Najib, *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1993), 100.

Akar pemikiran politik Gus Dur lainnya adalah penguatan *civil society*. Ia berpendapat, paradigma baru yang harus dikembangkan oleh umat Islam adalah mengambil titik masuk strategis (*strategic entry points*), yaitu pembentukan *civil society* (pemberdayaan rakyat bawah). Pengembangan orientasi *civil society* ini sejalan dengan NU setelah kembali ke khittah 1926. Menurut Muhammad AS. Hikam, bagi NU *civil society* sejalan dikarenakan: Pertama, NU tak lagi hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan warga nahdliyin saja, tetapi diperluas hingga menyangkut kepentingan bangsa. Kedua, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah *civil society* yang mendirikan kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangannya. Ketiga, NU pasca khittah berniat menitik beratkan geraknya pada level masyarakat dan ditujukan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan dirinya.²³

Menurut, Gus Dur partai politik adalah sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membeda-bedakan asal-usul, suku, ras, golongan, agama, dan profesi. Dan sebagai aspirasi rakyat untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik rakyat. Juga sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara

Pokok-pokok pemikiran Gus Dur sangat inspiratif dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baginya, doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemasyarakatan. Ideologi yang relevan bagi Indonesia adalah ideologi Pancasila; selain itu, demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Demokrasi harus diperjuangkan sistemik, kultural dan kontinyu tanpa radikalisme; Untuk itu, pluralisme adalah jaminan bagi setiap warga Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dengan rasa aman. Pluralisme dapat dibangun dengan kerangka Ukhuwah Insaniyah (Persaudaraan Kemanusiaan), Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan Kenegaraan).

²³Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 88.

B. Ahmad Syafii Ma'arif dan Pemikiran Politik tentang Hubungan Islam dan Negara

1. Biografi Ahmad Syafii Ma'arif

Ahmad Syafii Maarif, atau yang akrab disapa Buya Syafii, lahir di Calau, Sumpur Kudus Selatan pada hari Sabtu, 31 Mei 1935. Lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf dan Fathiyah sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Ayahnya, Ma'rifah Rauf, adalah sosok yang terpandang di Sumpur Kudus, sebagai kepala suku Malayu dengan gelar Datok Rajo Malayu dan sebagai Kepala Nagari yang dijabatnya sampai tahun 1946. Secara ekonomi ayahnya termasuk dalam kategori elite kampung, tempat masyarakat mengadu tentang berbagi masalah, tidak saja yang menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah adat dan lembaga tingkat Negeri. Ma'rifah Rauf adalah sosok yang cerdas, orang-orang Sumpur Kudus juga mengakui hal tersebut.²⁴ Sebagai kepala Negeri dan Pedagang, ia cukup disegani oleh masyarakat. Perannya sebagai kepala suku Malayu, membuatnya sangat paham adata Nagari dalam bingkai alam Minangkabau. Sekalipun pendidikannya hanya sampai tingkat SR 5 tahun, tapi karena kegemarannya membeli dan membaca buku, menjadikan pengetahuannya di atas rata-rata orang kampung.²⁵

Ibunya, Fathiyah, meninggal ketika umur 18 bulan. Ibunya wafat pada 1937 dalam usia yang cukup muda, sekitar 32 tahun. Setelah ibunya meninggal, ia tinggal bersama bibinya, Bainah, yang letaknya sekitar 500 m dari rumahnya. Buya Syafii ditinggalkan dalam usia yang masih sangat kecil sehingga tidak memiliki gambaran mengenal wajah ibunya, kecuali dengan mendengar cerita-cerita dari keluarganya mengenai sosok almarhumah. Ditinggalkan oleh orang yang melahirkannya sejak kecil membuat ia menjadi sosok yang mandiri.²⁶

Ditengah keterbatasannya, Buya Syafii meyakini, kemerdekaan harus diisi dengan mencerdaskan jiwa dan otak anak-anak bangsa. Tidak ada jalan untuk mengubah nasib

²⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak),

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 81

²⁶ Ahmad Syafii Ma'arif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 43.

melainkan dengan cara bekerja keras, tabah, dan mau mengalami proses pencerahan secara terus menerus. Nasib seseorang memang ditangan Allah, tetapi yang menentukan perubahan itu ada atau tidak adalah manusianya sendiri. Allah baru mau ontervensi apabila manusia mengambil inisiatif untuk menentukan hari kedepannya.²⁷

Dunia awal masa kecil Ahmad Syafii Maarif dilewati di kampung halamannya. Pendidikan dasar diperoleh di Sekolah Rakyat (SR) Sumpur Kudus. Selanjutnya Ahmad Syafii Maarif melanjutkan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumpur Kudus hingga selesai pada tahun 1947. Di madrasah inilah ia mulai mengenal gerakan Islam yang bernama Muhammadiyah. Usai menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar, ia menganggur selama tiga tahun akibat revolusi, yang kemudian melanjutkan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Balai Tengah, Lintau, Sumatera Barat (1950-1953).

Pada tahun 1953 dalam usi 18 tahun, ia hijrah ke Yogyakarta atas ajakan Sanusi Latief bersama dua adik sepupunya Azra'i dan Suwardi. Merantau ke Jawa bagi orang kampungnya bukan perkara biasa. Tanpa Sanusi Latief, perjalanan jauh ini tidak akan terjadi. Kemudian melanjutkan sekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta (lulus pada tahun 1956). Di mua'llimin, ia juga turut aktif dalam kegiatan Hizbul Wathan dan pernah dipilih menjadi Sekretaris Hizbul Wathan. Ia juga pernah menjadi penulis dalam majalah Sinar dalam lingkup pelajar muallim Yoga sebagai media cetak untuk berlatih menulis.²⁸

Kemudian, melanjutkan studinya di Solo, Universitas Cokroaminoto Surakarta. Karena berlakunya ijazah hanya lima tahun, ia tidak bisa langsung mendaftar sebagai mahasiswa, melainkan masuk sekolah terlebih dahulu yang disediakan oleh universitas dan lulus dengan gelar Sarjana Muda Sejarah budaya pada tahun 1964. Selanjutnya, ia kembali ke Yogyakarta dan melanjutkan di Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) IKIP Yogyakarta (sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta). Awalnya cukup sulit bagi Buya Syafii untuk

²⁷ Ahmad Syafii Ma'arif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 49.

²⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 89-114.

mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada fakultasnya tersebut, tetapi berkat rekomendasi dari beberapa dosen fakultas yang menguatkan rekomendasinya sehingga ia bisa masuk di universitas ini.

Pada tahun 1968, ia sukses meraih Gelar Sarjana Sejarah dengan skripsi yang berjudul “Gerakan Komunis Vietnam”.²⁹ Untuk memperdalam ilmunya sebagai seorang dosen, ia melanjutkan kuliah masternya di Universitas Ohio Athens dengan beasiswa fullbright dan berhasil mengantongi ijazah M.A dalam bidang sejarah dengan tesis “*Islamic Politics Under Guided Democracy in Indonesia (1959-1965)*” pada 1978.³⁰ Kemudian mengambil program Ph.D dalam pemikiran Islam di Universitas Chicago Amerika Serikat yang diselesaikan pada tahun 1983 dengan disertasi “*Islam as the Basic of State; A Study of the Islamic Political Ideal as Reflected in the Cinsituent Assembly Debates in Indonesia*” dibawah bimbingan Prof. Dr. Fazlur Rahman.³¹

Pada Mukhtamar tahun 2000 di Jakarta, Ahmad Syafii Maarif kemudian terpilih untuk memimpin Muhammadiyah untuk periode 2000-2005. Selama kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif di Muhammadiyah, banyak terobosan baru yang belum pernah dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya Muhammadiyah lebih banyak tampil dan dikenal sebagai gerakan da’wah, pendidikan, amal, dan usaha sosial, maka pada era Syafii Maarif, Muhammadiyah lebih mewarnai percaturan bangsa dan menjawab tantangan perkembangan dunia.

Di masa Ahmad Syafii Maarif, posisi Muhammadiyah yang mengambil jarak dari semua partai politik dan tidak terlibat oleh politik praktis juga kembali ditegaskan. Hal itu terumuskan lewat Tanwir Makasar pada Juni 2003 yang tidak mendukung partai dan calon presiden tertentu. Bahkan, di saat tokoh-tokoh bangsa dan ormas Islam lainnya larut dan tergoda pada perebutan kue kekuasaan, Syafii Maarif justru tidak bergeming dan tetap konsisten dengan perannya sebagai

²⁹ Ahmad Syafii Ma’arif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 124-187.

³⁰ Ahmad Syafii Ma’arif, *Memoar Seorang Anak Kampung*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 202.

³¹ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 1995), h.5

pemimpin umat dan guru bangsa. Hal ini tentu saja berangkat dari keyakinan beliau selama ini, bahwa Muhammadiyah pada dasarnya adalah gerakan pemikiran, sosial, dan dakwah. Jadi, Muhammadiyah bukan gerakan politik yang bisa dijadikan untuk alat merebut kekuasaan.³²

Selanjutnya, Ahmad Syafii Maarif adalah salah seorang yang mempunyai prakarsa untuk mendirikan Maarif Institute for Culture and Humanity. Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tahun 2002 dan secara resmi berdiri pada tanggal 28 Februari 2003. Adapun salah satu misi Maarif Institute adalah memperjuangkan percepatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi *civil society*, legislatif dan eksekutif serta mendorong proses resolusi konflik, mediasi dan rekonsiliasi.

Ahmad Syafii Maarif adalah tokoh yang menghindari politik praktis, ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih kurang tujuh tahun dan tidak pernah terjun ke politik praktis, baik itu menjabat jabatan publik, mencalonkan ataupun bergerak melalui partai politik.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif merupakan khazanah intelektual yang sangat berharga, karena gagasan-gagasannya tidak dapat dilihat semata-mata sebagai renungan intelektual dari tokoh yang berada diatas menara gading, sebab mereka menulis dalam konteks sebuah pergerakan sosial, keagamaan dan politik di Indonesia dimana beliau terlibat secara intens dan serius sebagai pelaku utama yang bergerak diluar sistem praktis yang mencurahkan segenap perhatiannya sebagai pelaku yang menyerukan pergerakan moral dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.³³

2. Karya-karya Ahmad Syafii Ma'arif

Ahmad Syafii Maarif sebagai seorang kolumnis, dosen Pasca-Sarjana IAIN Yogyakarta yang sehari-harinya mengajar di FP IPS IKIP Yogyakarta ini menulis artikel di majalah Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Genta, di samping di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam, dan dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu, ia juga menuangkan

³² Abd. Rohim Ghazali dan Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, (Jakarta: Maarif Institute, 2005), 116-117.

³³ Raja Juli Antono, *Laporan Tahunan*, (Jakarta: Maarif Institute, 2000-2007), 4.

pikirannya dalam bentuk buku. Bukunya yang sudah terbit, antara lain berjudul:

- a. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (Bandung: Mizan, 2009).
- b. Menerobos Kemelut Refleksi Cendekiawan Muslim (2006).
- c. Titik-Titik Kisar Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif (Yogyakarta: Ombak, 2006).
- d. Mencari Autentitas dalam kegalauan (Jakarta: PSAP, 2004).
- e. Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik (Jakarta: Cidesindo, 2000).
- f. Islam dan Politik Membingkai Peradaban (1999).
- g. Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat (1997).
- h. Keterkaitan antara Sejarah, Filsafat, dan Agama (Yogyakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, 1997).
- i. Islam dan Politik; Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- j. Muhammadiyah dalam Konteks Intelektual Muslim (Bandung: Mizan, 1995).
- k. Percik-Percik Pemikiran Iqbal (Shalahuddin Press, 1994).
- l. Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia (Jakarta: Mizan, 1994).
- m. Islam dan Politik di Indonesia (1988).
- n. Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985).
- o. Menuju Persatuan Umat (2012)

3. Pemikiran Politik Ahmad Syafii Ma'arif tentang Hubungan Islam dan Negara

Hubungan antara agama dalam hal ini Islam (*din*) dengan negara (*dawlah*) atau politik (*siyasah*) kelihatannya menjadi isu perenial di kalangan ulama, pemikir Muslim bahkan gerakan Islam. Bisa dipastikan perdebatan tentang subjek ini bakal terus berlanjut di masa depan.

Dalam masa modern-kontemporer, menurut Syafii Ma'arif posisi hubungan antara Islam dan negara setidaknya terdiri dari tiga bentuk. *Pertama*, pemisahan antara agama dan politik yang bahkan disertai ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (*religiously unfriendly-secularism*) seperti Turki; *kedua*, pemisahan yang disertai ideologi yang

bersahabat dengan agama (*religiously friendly ideology*) seperti Indonesia. Bentuk kedua ini juga dapat disebut sebagai akomodasi antara negara dan agama; *ketiga*, penyatuan agama dengan negara seperti Arab Saudi, yang dapat juga disebut sebagai teokrasi.³⁴

Pandangan Syafii Maarif tentang hubungan antara Islam dan negara secara garis besar bukan sekedar pola hubungan dikotomis yang saling meniadakan. Pola hubungan Islam dan negara bukan hanya semata-mata menjadikan Islam sebagai ritual peribadatan hamba kepada Tuhan semata, tetapi Islam lebih dari itu juga menyangkut hal-hal yang berhubungan tentang kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah atau hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat.³⁵

Sejalan dengan pemikiran tersebut, agar aturan-aturan dan patokan-patokan tersebut dapat terjaga dan direalisasikan, maka menurut Syafii Maarif harus ada negara atau kekuasaan politik yang melindunginya dan demokrasi (*syura*) adalah bentuk negara atau sistem politik yang ditawarkan oleh Syafii Maarif.³⁶

Syafii Maarif meletakkan Islam sebagai tujuan atau orientasi pemikiran dan perjuangan politik yang tertinggi, dan menegaskan Islam sejarah yang traumatik dan dibungkus pendekatan doktriner yang dianggapnya tidak Islami. Syafii Maarif melihat teori dan sistem politik Islam sebagai ruang yang terbuka dan fleksibel terhadap perubahan. Etika dan moral Al-Qur'an yang universal harus memberikan inspirasi dan substansi terhadap teori politik dan kenegaraan yang setiap waktu terus berubah sesuai dengan kebutuhan umat dan zaman.³⁷

Menurut pemahaman Syafii Maarif Islam bukanlah hanya cita-cita moral dan nasehat-nasehat agama yang dapat

³⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Fikih Kebinekaan*, (Jakarta: PT Mizan, 2015), 115.

³⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 13.

³⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h.18.

³⁷ M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 182.

lepas begitu saja, tetapi Islam memerlukan sarana untuk mewujudkan cita-cita moralnya yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia, yaitu sebuah negara. Di mata Al-Qur'an tidak sedikitpun dari dimensi kehidupan manusia yang terlepas dari sorotan wahyu, dengan demikian jika ada pemikir muslim yang berpendapat bahwa Islam dan negara harus dipisahkan maka pendapat tersebut tidak memiliki landasan yang teoritis.³⁸

Pemikiran Syafii Maarif tentang hubungan Islam dan negara ini merupakan hubungan yang simbiotis atau saling memerlukan satu sama lainnya. Pemikiran Syafii Maarif ini, bisa disandingkan dengan pemikiran politik kenegaraan A. Hasjmy yang juga berpendapat bahwa keterkaitan agama (Islam) dengan negara sangat diperlukan agar ajaran Islam dapat berjalan dan eksis dalam masyarakat.³⁹ Keterkaitan itu diperlukan mengingat institusi yang paling wajar untuk melindungi agama adalah negara. Sedangkan negara agar terhindar dari kesewenangan ketika memerintah rakyatnya, menjadikan tuntunan agama sebagai sumber etik moral yang dapat memberi keadilan, kemakmuran masyarakat yang merupakan salah satu cita Islam.

Akan tetapi, hubungan ini menurut Syafii Maarif bukan berarti bahwa Islam adalah agama dan negara. Menurutnya, mengidealisasikan kesetaraan agama dan negara adalah pandangan yang salah, hal ini menurut Syafii Maarif sama artinya dengan melakukan pengsejajaran antara agama dan negara, yang secara tidak sadar telah menyamakan risalah dengan alat. Pandangan seperti ini, menurut Syafii Maarif, lebih didasarkan pada resistensi terhadap teori-teori politik barat yang akar-akarnya bisa ditelusuri dari doktrin pemisahan antara agama dan negara. Bagi Syafii Maarif, negara adalah sesuatu yang *mutable* (berubah) sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sedangkan agama adalah sesuatu yang *immutable* (tetap) tidak lekang oleh ruang dan waktu.⁴⁰

Penolakan Syafii Maarif tentang negara Islam, dikarenakan menurutnya gagasan negara Islam tidak memiliki

³⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995) 204.

³⁹ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 113.

⁴⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995) 205-206 .

basis religio-intelektual yang kukuh. Piagam Madinah yang merupakan hasil karya Rasulullah tidak menyinggung sama sekali masalah negara Islam. Akan tetapi, tidak bisa juga diabaikan bahwa Islam membutuhkan sebuah organisasi politik, yang merupakan suatu mesin kekuasaan yang efektif dalam bentuk negara untuk membumikan cita-cita dan ajaran moral yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tetapi kekuasaan politik atau negara itu bukanlah Islam. Dengan demikian, negara bukanlah persambungan (dengan) agama. Ketegangan yang terjadi, justru ketika para sarjana Islam merumuskan doktrin politik Islam yang menggambarkan seolah-olah Islam menjadi alat negara.

Posisi Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an hanyalah sebagai seorang rasul, tetapi juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad pernah menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama.⁴¹ Posisi sebagai Rasulullah tidak pernah berubah hingga beliau wafat pada tahun 632 M, kedudukan Nabi Muhammad sebagai rasul didefinisikan di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 144, ayat inilah yang kemudian digunakan Syafii Maarif untuk menolak pendapat para tokoh muslim yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.

Menurut Syafii Maarif, Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dan juga tidak pernah mendeklarasikan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku, yang harus diikuti oleh umat Islam. Adanya negara dalam Islam sangatlah penting, akan tetapi pandangan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara tetap saja ditolaknya. Pandangan Syafii Maarif tentang relasi Islam dan negara bertentangan dengan pendapat dari para pengusung negara Islam dengan memformulasikan syariat Islam menjadi hukum negara.

Mekanisme politik yang beragam dapat dilihat dari sejarah kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam mengalami yang namanya krisis kepemimpinan, yang disebut krisis konstitusional oleh Syafii Maarif.⁴² Umat Islam mengalami kebingungan tentang siapa

⁴¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006), h.14.

⁴² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h.19.

yang harus menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala komunitas Islam. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikannya, selain itu baik Al-Qur'an maupun Sunah Nabi tidak memberikan perintah-perintah yang tegas tentang bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya.⁴³

Islam di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dimana terdapat perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh pemikir baik Islam maupun nasional di dalam menentukan dasar negara Indonesia. Tokoh Islam Indonesia yang sangat menginginkan Indonesia sebagai negara Islam adalah Mohammad Natsir. Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya, ia merupakan agama yang serba lengkap (komprehensif). Persoalan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari dan diatur Islam.⁴⁴

Dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante pada tahun 1957, Natsir menginginkan Islam sebagai dasar negara karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, Natsir berdalil bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu Sekularisme (*la-diniyah*) dan paham agama (*din*). Menurut Natsir, dasar pemerintahan negara telah jelas dan pasti, yaitu Islam. Prinsip pemerintahan negara tidak boleh yang lain dan hanya dengan kekuasaan politik (negara) aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam dapat dijalankan dalam kehidupan nyata, maka dari itu Natsir membela prinsip persatuan negara dan agama.⁴⁵

Menurut Syafii Maarif, aspirasi dari para tokoh Islam Indonesia di masa kemerdekaan yang menghendaki Islam menjadi dasar negara Indonesia bila dikaji secara mendalam tidak memiliki tujuan yang jelas dan merupakan usaha yang prematur yang tidak realistis karena belum mempersiapkan fondasi intelektual keagamaan yang kukuh. Bagi Syafii Maarif menempatkan syariat Islam ke dalam mekanisme kehidupan

⁴³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2006), h.20.

⁴⁴ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta : Teraju, 2002), 93.

⁴⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h 129.

politik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Syafii Maarif dalam hal ini mengkritik para tokoh Islam masa lampau yang menurutnya lebih mengutamakan wadah, yaitu menegakkan negara berdasarkan Islam secara formal.

Menurut Syafii Maarif, Islam tidak mempermasalahkan apapun nama dan bentuk pemerintahan yang dipakai oleh umat Islam, yang terpenting adalah bagaimana moral etik dapat berjalan dalam sebuah negara tersebut. Tujuan terpenting dalam sebuah negara dalam Al-Qur'an dan juga Islam adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etiknya dijunjung tinggi serta bersifat mengikat terhadap kegiatan-kegiatan sosio-politik umat Islam. Nilai-nilai tersebut secara menyeluruh dan integral dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kemerdekaan yang semuanya menempati posisi sentral dalam ajaran moral Al-Qur'an.

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia menurut Syafii Maarif memberikan suatu pondasi yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral bagi kehidupan ini. Al-Qur'an memperlakukan kehidupan manusia sebagai suatu keseluruhan yang organik, semua bagian-bagiannya haruslah dibimbing oleh petunjuk dan perintah-perintah etik dan moral yang terdapat dalam ayat-ayatnya.⁴⁶ Agar dapat merealisasikan ajaran Islam maka dibutuhkan negara sebagai penyokong agama, bagi Syafii Maarif negara merupakan alat yang sangat penting bagi agama, tetapi tidak dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Menurut Syafii Maarif aspirasi politik umat Islam hendaknya tidak menginginkan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memformulasikan syariat Islam, akan tetapi umat Islam harus menjalankan kehidupan atas dasar kebersamaan dan musyawarah (syura).⁴⁷ Prinsip syura sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menghendaki terciptanya masyarakat yang egaliter dengan menjalankan mekanisme syura, dalam pandangan Syafii Maarif prinsip dasar yang paling pokok adalah konsep syura yang menjadi cita-cita sentral dalam cita-cita politik Al-Qur'an.

⁴⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 11

⁴⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 17.

Pandangan politik Syafii Maarif lebih menekankan pada nilai-nilai substantif Islam, sehingga sangat wajar bila Syafii Maarif meminjam ungkapan Hatta untuk menggambarkan hubungan Islam dan negara di Indonesia, yang kira-kira berbunyi “Janganlah gunakan filsafat gincu, tampak tetapi tak terasa; pakailah filsafat garam, tak tampak tetapi terasa”. Hatta dengan imannya yang tulus tidak rela menyaksikan Islam Indonesia seperti gincu, tampak tetapi tak terasa, sibuk dengan serimoni tetapi kehilangan substansi, meneriakkan Allahu Akbar sambil merusak dan menghujat orang lain.⁴⁸

Dari ungkapan Hatta tersebut, Syafii Maarif menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam harus bisa menggarami kehidupan budaya bangsa hingga akhlak mulia dan keadilan dapat ditegakkan secara nyata, bukan dalam format retorika politik yang tidak bertanggung jawab.⁴⁹ Tegaknya keadilan dalam masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an adalah penjabaran tauhid di muka bumi. Harapan bahwa sejarah modern Indonesia akan bergerak ke arah tujuan strategis yang menggarami ini, tidak hanya terlihat dalam bentuk-bentuk simbol atau ritual yang sering kali menyesatkan. Para politisi muslim perlu memahami kondisi psikososologis bangsa ini dengan jeli dan akurat.

Dikhianati dalam laku, hanyalah akan memperpanjang derita bangsa ini, sementara tujuan kemerdekaan berupa tegaknya sebuah masyarakat adil dan makmur akan semakin Syafii Maarif mengungkapkan bahwa Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara Indonesia harus membukakan pintu seluas-luasnya bagi masuknya sinar wahyu, sehingga tuduhan bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak berbeda dengan negara sekuler akan dapat ditangkal.⁵⁰ Pancasila yang hanya dimuliakan dalam kata, tetapi menjauh saja.

⁴⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 281.

⁴⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas dalam Kegalaan*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004), 72.

⁵⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009), 196.

Menurut Syafii Maarif, setelah dikaji dalam konteks kultur Indonesia, sampai sekarang tidak ada konsep lain yang tepat yang secara rasional dapat mengukuhkan persatuan dan keutuhan bangsa, kecuali lima dasar Pancasila.⁵¹ Kelima sila Pancasila itu jika dipahami secara benar dalam satu kesatuan tidak ada yang perlu dipersoalkan dari sudut pandangan teologi Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hatta, bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan fondasi moral yang kukuh bagi keempat sila lainnya dan harus menjadi pembimbing bagi cita-cita kenegaraan lainnya.⁵²

Pengalaman traumatik masa lampau ketika Islam dibenturkan dengan politik kekuasaan menurut Syafii Maarif jangan diulang lagi, sebab hanya akan berujung dengan kesia-siaan. Dengan ungkapan lain, Islam yang harus ditawarkan adalah sebuah Islam yang bersedia bergandengan tangan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Maka demi upaya mengukuhkan keindonesiaan dan kemanusiaan, bagi Syafii Maarif Piagam Jakarta tidak perlu lagi dilihat dari perspektif legal-formal, tetapi diambil ruhnyanya berupa tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh penghuni nusantara, tanpa diskriminasi.⁵³

Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya harus berhenti untuk dijadikan retorika politik. Semua nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterjemahkan kedalam format yang konkrit sehingga prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” benar-benar menjadi kenyataan. Selain itu Pancasila juga tidak bisa dipisahkan dari Islam yang merupakan sumber moral untuk seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu, umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia berkewajiban

⁵¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 23.

⁵² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h 158.

⁵³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 311-312.

mutlak untuk mewarnai Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang bersifat universal.⁵⁴

Pancasila akan sangat rapuh bila dipisahkan dari wahyu, ungkapan Baharuddin Lopa sebagaimana yang dikutip oleh Syafii Maarif sangat cocok untuk menggambarkan hal tersebut “Pancasila tanpa agama mati”.⁵⁵ Maksudnya adalah agar Pancasila harus tidak malu-malu lagi untuk mengundang intervensi wahyu agar bisa menyinari dirinya. Di bawah sinar wahyu, Pancasila akan punya dasar moral yang kokoh, moral transendental, bukan hanya moral politik yang terlalu mendunia, dan cenderung korup.

Maka tugas selanjutnya adalah mengisi Pancasila dengan nilai-nilai kenabian, yang sangat kaya dalam masalah moral, etika, sumber hukum, dan doktrin eskatologis yang tidak mungkin diberikan filsafat ciptaan manusia. Untuk keperluan masalah-masalah besar ini, Pancasila harus bersikap jujur dalam mengukur dirinya yang serba terbatas dalam dinding ke-Indonesiaan, sekalipun aspek universal dari empat sila yang lain dapat dikembangkan lebih jauh. Jika Pancasila tetap saja menjadi permainan bibir, sementara prinsip-prinsipnya diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka masa depan Indonesia sulit sekali dibayangkan akan menjadi lebih baik.⁵⁶

Penerimaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara oleh para pemikir Muslim Indonesia yang lebih muda adalah penerimaan secara sadar, bukan karena kalkulasi politik kekuasaan, bukan pula untuk mengganti Islam dengan Pancasila, sesuatu yang tidak mungkin. Para pemikir ini adalah generasi terdidik yang hidup di era lain yang dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sibuk dengan pertarungan tentang masalah dasar negara. Bagi pemikir yang datang kemudian, alur pemikiran dan strategi intelektualnya sudah

⁵⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 127.

⁵⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1965), 145.

⁵⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 315

berbeda, “ilmu garam jauh lebih penting dari pada ilmu gincu”.⁵⁷

Selain itu, munculnya kesadaran di kalangan generasi muda muslim untuk memasyarakatkan ajaran Islam tanpa harus mengganti dasar negara Pancasila juga menjadi faktor pendorong yang membuktikan bahwa generasi muda muslim Indonesia benar-benar berbeda cara berpikrinya dengan generasi sebelumnya. Para generasi muda ini menginginkan ajaran Islam menjadi patokan utama bagi penganutnya. Dengan kata lain, Islam harus dijadikan sumber moral bagi pelaksanaan Pancasila, khususnya bagi umat Islam. Berarti, penganut agama lain juga secara penuh berbak menyinari Pancasila dengan ajarannya masing-masing.⁵⁸

Pemikiran Islam dan negara Syafii Maarif lebih mementingkan nilai-nilai substansi Islam seperti kesejahteraan, persamaan, keadilan, kebebasan dan sebagainya daripada melakukan formalisasi hukum Islam sebagai dasar negara. Bagi Syafii Maarif, negara dengan segala atribut yang disandangnya bukan masalah yang fundamental dalam Islam, dengan kata lain apapun bentuk negaranya bukan menjadi hal yang penting, yang terpenting adalah pemerintahan negara tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan nilai-nilai substansial lainnya bagi masyarakat.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma’arif tentang Hubungan Islam dan Negara

Dari paparan tentang masing-masing pandangan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma’arif dalam melihat hubungan Islam dan negara di Indonesia penulis menganalisa beberapa perbedaan dan persamaan dari kedua pemikiran tokoh tersebut. Secara umum sulit untuk menemukan perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma’arif dalam melihat hubungan Islam dan negara di Indonesia.

⁵⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h.284

⁵⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 152 .

1. **Persamaan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif Tentang Hubungan Islam dan Negara**

Faktor kedekatan dan persahabatan antara Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif menjadi titik yang membuat kecenderungan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pemikiran keduanya dalam melihat hubungan Islam dan negara. Terdapat beberapa hal yang menjadi titik persamaan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif.

Pertama, dalam melihat hubungan antara Islam dan negara Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif memiliki pandangan yang cenderung sama bahwa menolak adanya gagasan tentang negara Islam. Keduanya sepakat menolak adanya formalisasi untuk mewujudkan sistem Islam karena hal itu mengabaikan pluralitas masyarakat. Menurutnya, di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan tata politik dan pemerintahan khas Islam. Tetapi Al-Qur'an secara eksplisit menekankan agar nilai dan pemerintahan etiknya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas berbagai kegiatan sosio-politik dan sosio-kultural umat Islam. Atas dasar nilai-nilai etik Al-Qur'an inilah bangunan politik Islam dan bangunan sosiokultural wajib ditegakkan.

Kedua, dilihat dari pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif tentang hubungan Islam dan negara, mereka tergolong kelompok moderat yang lebih condong dengan paradigma simbiotik dimana dalam pandangannya Islam tidak harus dijadikan sebagai dasar negara, karena pada dasarnya Islam bersifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam dijadikan sebagai etika moral dalam tuntunan perilaku masyarakat suatu negara.

Ketiga, memiliki pandangan yang sama dalam demokrasi, dalam hal hubungan Islam dan negara di Indonesia Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif menekankan nilai-nilai substansi Islam seperti dalam mewujudkan kesejahteraan, persamaan, keadilan, kebebasan, musyawarah (syura) dan sebagainya daripada melakukan formalisasi hukum Islam sebagai dasar negara. Untuk itu, yang terpenting pemerintahan negara harus mewujudkan nilai-nilai substantif tersebut bagi seluruh masyarakat.

Keempat, pandangan terkait dengan Pancasila, memiliki pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan keputusan final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila itu sendiri sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama merupakan landasan keimanan masyarakat dan menjadi motivasi, yang memberikan kekuatan spiritual pada setiap kegiatannya.

2. Perbedaan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif Tentang Hubungan Islam dan Negara

Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Ma'arif merupakan tokoh yang memiliki latar belakang keorganisasian yang berbeda, Abdurrahman Wahid berasal dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama' dan Ahmad Syafii Ma'arif berasal dari organisasi Islam Muhammadiyah. Keduanya sama-sama pernah menjadi pemimpin di organisasinya masing-masing.

Persahabatan kedua tokoh ini sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap arah pemikiran politiknya. Dalam hal perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut, penulis dapat mengidentifikasi adanya beberapa celah yang bisa dilihat untuk membedakan antara keduanya.

Meskipun secara umum keduanya pemikirannya berada pada tataran moderat (simbiotik) dalam melihat hubungan Islam dan negara. Namun menurut Abdurrahman Wahid partai politik adalah sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, suku, ras, golongan, agama, dan profesi. Dan sebagai aspirasi rakyat untuk mewujudkan hak-hak sipil dan politik rakyat. Juga sebagai sarana untuk mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. Sedangkan Ahmad Syafii Ma'arif berpendapat bahwa Islam itu bukan dalam bentuk partai Islam maupun negara Islam, tetapi berada dalam bentuk nilai-nilai yang menjadi landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pada dasarnya perbedaannya hanya terletak pada perjuangan simbolik dan perjuangan substantif.